

KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal 1	Kamis, 13 Februari 2020	Benahi Akses Pelabuhan	Keterbatasan akses dari dan menuju empat pelabuhan utama di Indonesia membuat aktivitas ekspor dan impor kerap didera kongesti. Pembenahan perlu dilakukan untuk memacu daya saing logistik sekaligus mendongkrak kinerja dagang. Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Makassar.
2	Bisnis Indonesia, Hal 20	Kamis, 13 Februari 2020	Berita Foto	Pekerja melakukan perawatan di sekitar Rumah Susun (Rusuni) Pasar Rumpit, Jakarta, belum lama ini. Kementerian PUPR telah menyerahkan kepada Pemprov DKI. Saat ini pembangunan sudah rampung dan pedagang mulai menempati kios-kios yang sudah ada
3	Bisnis Indonesia, Hal 20	Kamis, 13 Februari 2020	Anggota REI Bakal Gelontoran Rp 1.000 Triliun	DPP REI memperkirakan investasi yang digelontorkan kalangan pengembang anggota asosiasi tersebut dalam berbagai berbagai kegiatan pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 1.000 triliun
4	Bisnis Indonesia, Hal 21	Kamis, 13 Februari 2020	Anggota AKI Jajaki Kerjasama dengan Asing	Pembangunan ibu kota negara memerlukan pendanaan sebesar Rp 466 triliun. Asosiasi kontraktor Indonesia mengungkapkan sejumlah anggotanya sudah melakukan peninjauan kerja sama dengan investor asing untuk menggarap proyek-proyek ibu kota negara baru
5	Bisnis Indonesia, Hal 21	Kamis, 13 Februari 2020	Brantas Abipraya Minta Pembebasan Lahan Dituntaskan	PT Brantas Abipraya memastikan pembangunan Bendungan Ciawi di Jabar berjalan sesuai dengan jadwal dan akan rampung pada tahun ini
6	Bisnis Indonesia, Hal 21	Kamis, 13 Februari 2020	Berita Foto	Kendaraan melintas proyek pembangunan Tol Cibitung-Cilingcing di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jabar, Rabu (12/2).
7	Bisnis Indonesia, Hal 16	Kamis, 13 Februari 2020	Umatra Utara Menata Wajah Kota	Provinsi Sumatra Utara mulai ancap-ancang menyiapkan infrastruktur penunjang kegiatan olahraga. Momentum tersebut juga akan dijadikan "senjata" bagi Sumut untuk menata wajah sejumlah kota di wilayahnya, termasuk guna memantik tingkat kunjungan pariwisata.
8	Kompas, Hal 16	Kamis, 13 Februari 2020	Ruas Tol Paling Timur di Jawa Ditentukan	Tiga kabupaten di Jawa Timur dilintasi Jalan Tol Proboliggo-Banyuwangi sepanjang 172 kilometer. Lokasi ruas jalan di dua kabupaten sudah diputuskan yang akan diikuti proses pembebasan lahan.

Judul	Benahi Akses Pelabuhan	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 1		
Resume	Keterbatasan akses dari dan menuju empat pelabuhan utama di Indonesia membuat aktivitas ekspor dan impor kerap didera kongesti. Pembenhahan perlu dilakukan untuk memacu daya saing logistik sekaligus mendongkrak kinerja dagang. Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Makassar.		



| DAYA SAING LOGISTIK |

BENAHAI AKSES PELABUHAN

Bisnis, JAKARTA — Keterbatasan akses dari dan menuju empat pelabuhan utama di Indonesia membuat aktivitas ekspor dan impor kerap didera kongesti. Pembenhahan perlu dilakukan untuk memacu daya saing logistik sekaligus mendongkrak kinerja dagang.

Rizaldi H. Alza & Hendra Wibawa
pelaku@bisnis.com

Kempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Makassar.

Hasil penelusuran Bisnis menunjukkan, empat pelabuhan untuk aktivitas ekspor dan impor itu hanya memiliki tidak lebih dari dua akses moda saja, yaitu jalan raya dan kereta api. Padahal, pelabuhan lain di luar negeri umumnya memiliki beragam pilihan moda seperti jalan tol, kereta api, hingga kanal atau sungai.

Kondisi tersebut diperparah juga dengan dominasi jalan raya sebagai akses utama dari dan menuju pelabuhan utama itu.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Ilham Masita mengatakan pelabuhan lain di

luar negeri memiliki akses yang sangat lancar karena kapasitas selalu disiapkan di atas kebutuhan pelabuhan. Hal yang sama belum ditemui di Indonesia.

"Karena tidak memadainya akses ke pelabuhan, biaya transportasi ke pelabuhan menjadi mahal dan akhirnya mengurangi daya saing," katanya, Rabu (12/2).

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi menyatakan akses ke pelabuhan utama di Indonesia masih banyak permasalahan mulai dari kemacetan hingga sistem digitalisasi yang kerap terganggu.

"Dihandingkan dengan akses jalan dari dan ke pelabuhan di negara lain seperti Vietnam dan Thailand, akses jalan pelabuhan di Indonesia tidak kompetitif," kata Yuki, Menteri

Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui peringkat daya saing pelabuhan di Indonesia masih rendah, maksimal di kisaran 80 dibandingkan dengan negara lain.

"Daya saing harus bertambah baik. Tahun depan harus nomor 70 atau 80," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuka akses logistik dan kargo secara luas ke pelabuhan-pelabuhan mancanegara. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengatasi apabila masih ada pelayatan yang lambat.

Langkah penguatan pun terus dilakukan oleh perusahaan pelabuhan pelat merah, PT Pelindo II (Persero) dan PT Pelindo III (Persero) masing-masing membangun jalan layang Terminal Teluk Lamong dan

New Priok East Access (NPEA), atau akses baru ke Pelabuhan Tanjung Priok melalui pintu timur.

CONTOH NEGARA LAIN

Pakar kemitraan Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Raja Olan Saat Garming menilai akses pelabuhan merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi waktu tunggu kapal di pelabuhan.

Dia menyarankan Indonesia belajar dari negara lain dalam mengurus akses menuju pelabuhan utama.

"Peran pemerintah lewat mekanisme APBN mungkin dapat menjadi solusinya atau dengan pola kerja sama pemerintah-swasta yang dijamin pemerintah. Hal ini terjadi di sejumlah negara lain khususnya, China

dan Belanda," ujarnya.

Dia mencontohkan akses tol ke Pelabuhan Yangshan-Shanghai China, dominan didanai oleh Pemerintah China. Sementara itu, pengopertasiannya dilakukan oleh operator pelabuhan dan operator jalan tol lainnya.

"Termasuk dengan fasilitas aksesibilitas di Pelabuhan Hamburg, Jerman," kata Raja.

Adapun, Pelabuhan Hamburg merupakan pelabuhan terbaik kedua di Eropa. Pelabuhan itu didukung akses jalan tol, transportasi Sungai Elbe, dan kereta api.

Selain itu, Pelabuhan Hamburg juga memiliki platform digital yang dikembangkan guna memudahan proses bisnis. (Antara & Pujiati)

Demi Kelancaran Arus Barang



Meskipun arus barang ke sejumlah pelabuhan utama untuk ekspor dan impor di Indonesia terus naik dari tahun ke tahun, peningkatan akses masih diperlukan untuk meningkatkan daya saing secara global.

Perkembangan Logistics Performance Index (LPI) Negara Asean

Negara	Peringkat		
	2014	2016	2018
Singapura	5	5	7
Malaysia	25	32	41
Thailand	35	45	32
Indonesia	57	63	76
Vietnam	48	64	39
Filipina	53	71	60
Kamboja	83	73	98
Myanmar	145	113	137

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 20		
Resume	Pekerja melakukan perawatan di sekitar Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumpit, Jakarta, belum lama ini. Kementerian PUPR telah menyerahkan kepada Pemprov DKI. Saat ini pembangunan sudah rampung dan pedagang mulai menempati kios-kios yang sudah ada		

■ RUSUN PASAR RUMPUT



Bisnis, Dwi Hafid Hartawan/P

Pekerja melakukan perawatan di sekitar Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumpit, Jakarta, belum lama ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah menyerahkan pengelolaan sementara Rusun Pasar Rumpit ke Pemprov DKI Jakarta. Saat ini proses pembangunan Rusun Pasar Rumpit telah selesai dan sejumlah pedagang pun telah menempati kios-kios yang ada, tetapi untuk penghunian unit rusun akan dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Judul	Anggota REI Bakal Gelontorkan Rp 1.000 Triliun	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 20		
Resume	DPP REI memperkirakan investasi yang digelontorkan kalangan pengembang anggota asosiasi tersebut dalam berbagai berbagai kegiatan pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 1.000 triliun		

| PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU |

Anggota REI Bakal Gelontorkan Rp1.000 Triliun

Bisnis, JAKARTA — DPP Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan investasi yang digelontorkan kalangan pengembang anggota asosiasi tersebut dalam berbagai proyek terkait dengan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur mencapai Rp1.000 triliun.

"Realisasi proyek-proyek yang dibangun anggota REI itu dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan untuk pembangunan properti," ungkap Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida.

Dia menegaskan anggota REI siap mendukung proyek IKN dengan investasi mencapai Rp1.000 triliun. "Karena apa? Tanah sudah disiapkan pemerintah, tinggal kita *sharing* bikin klaster, kita jual, dananya untuk bangun prasarana," ujarnya dalam perbincangan dengan *Bisnis*.

DASAR PEMILIHAN IBU KOTA NEGARA YANG BARU



Ibu kota negara yang baru telah ditetapkan berlokasi di Kalimantan Timur. Penetapan lokasi ibu kota baru tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan.

- ☑ Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia.
- ☑ Lokasi aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami;
- ☑ Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar;
- ☑ Dilintasi jalan tol dan jalan trans Kalimantan;
- ☑ Didukung oleh dua bandara;
- ☑ Dilayani oleh dua pelabuhan
- ☑ Berada di jalur ALKI II di sekitar Selat Makassar;
- ☑ Ketersediaan lahan luas;

- ☑ Ketersediaan air permukaan dilayani oleh 3 waduk eksisiting dan 2 waduk yang masih dalam tahap rencana serta 4 sungai (S.Wain, S.Samboja, S. Sanga-sanga, S.Sanggai dan 4 DAS Samboja, Sangai, Mahakam, Dondang);
- ☑ Kemampuan lahan untuk konstruksi bangunan sedang dan sebagian besar lokasi aman dari banjir
- ☑ Dari sisi pertahanan, dapat didukung oleh Tri Matra Terpadu (Darat, Laut, dan Udara)
- ☑ Struktur kependudukan sangat heterogen, potensi konflik rendah, dan terbuka terhadap pendatang

Sumber : *Bisnis*, 2019 Bisnis/Al Pramesia

Menurut Totok, dana pemerintah bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasana gedung pemerintahan. Sementara itu, REI siap membangun proyek lain seperti pembangunan rumah sakit dan kawasan hunian.

Totok juga tidak memungkiri minat pengem-

bang bisa saja dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek tersebut.

Hanya saja, Totok mengatakan bahwa perencanaan dan konsep dari proyek IKN tersebut harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai, pembangunan dari pihak

swasta sudah dilaksanakan, tetapi pemerintah sendiri belum memulainya.

"Jangan nanti swasta bangun klaster, tapi pemerintah *nggak* bangun-bangun gedungnya. Jadilah kita juga menunggu. *Wait and see*. Semua jadi saling menunggu," tuturnya. (Iham Budhiman/Mufiana Nabila/Fitri Sartina Deel)

Judul	Anggota AKI Jajaki Kerjasama dengan Asing	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 21		
Resume	Pembangunan ibu kota negara memerlukan pendanaan sebesar Rp 466 triliun. Asosiasi kontraktor Indonesia mengungkapkan sejumlah anggotanya sudah melakukan peninjauan kerja sama dengan investor asing untuk menggarap proyek-proyek ibu kota negara baru		

| PROYEK IBU KOTA NEGARA |

ANGGOTA AKI JAJAKI KERJA SAMA DENGAN ASING

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Kontraktor Indonesia mengungkapkan bahwa sejumlah anggotanya sudah melakukan peninjauan kerja sama dengan investor asing untuk menggarap proyek-proyek di ibu kota negara baru.

Agne Yasa
agne.yasa@bisnis.com

Pembangunan ibu kota negara memerlukan pendanaan sebesar Rp466 triliun. Skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan swasta/BUMN/BUMD diharapkan Rp466 triliun. Skema KPBU diproyeksikan berkontribusi Rp253,40 triliun dari kebutuhan dana secara keseluruhan, sedangkan swasta dan BUMN/BUMD berkontribusi Rp123,20 triliun. Sisanya, disiapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong agar investor asing mau berpartisipasi dan berinvestasi pada proyek ibu kota negara untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal atau BUMN.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Joseph Pangalila mengungkapkan bahwa sudah ada diskusi terkait dengan peluang kerja sama antara anggotanya dan investor asing untuk proyek ibu kota negara di Kalimantan Timur. Namun, dia belum bisa memerinci investor dari negara mana saja yang tengah menjajaki peluang kerja sama dengan anggotanya.

"Sudah ada [diskusi dengan investor asing], kalau dari mana saja persisnya kurang tahu, mesti *nanya* anggotanya satu per satu

karena ini *business to business discussions*," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (11/2).

Anggota AKI, katanya, sudah siap menggarap peluang-peluang yang ada. Pihaknya juga percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki anggota AKI.

"Semua proyek IKN [ibu kota negara] yang besar [dibidik] karena berada dalam kompetensi anggota AKI," ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) Shastia Hadiarti mengatakan bahwa perseroan menyambut baik rencana pemerintah terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

"WSKT yakin hal tersebut akan dapat mendorong kinerja pasar industri konstruksi di Indonesia selama beberapa tahun ke depan," katanya.

Dia menambahkan bahwa WSKT siap untuk menangkap peluang dari rencana pembangunan tersebut. Pihaknya juga yakin akan dapat berperan dalam pembangunan ibu kota negara berbekal pengalaman pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"WSKT tengah melakukan kajian pengembangan infrastruktur di lokasi IKN. Selain itu, PT Waskita Beton Precast Tbk., salah satu anak usaha WSKT, telah men-

irikan *plant precast* [pabrik beton pracetak] yang siap mendukung pembangunan di kawasan IKN [ibu kota negara] melalui suplai material beton pracetak," jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (11/2).

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WSKT) Tumiyana mengatakan bahwa pihaknya juga membidik proyek infrastruktur di ibu kota negara melalui skema KPBU. Menurutnya, banyak potensi proyek infrastruktur yang bisa digarap seperti gedung pemerintah, jalan, jaringan pipa, pengolahan limbah, hingga jembatan.

"Jadi, kalau mana yang dibidik, di antara 265 KPBU ya, ambil sesuai dengan kekuatan neraca [perusahaan] saya karena saya punya *space* 5 tahun ke depan sekitar Rp150 triliun, partial ya, tidak sekaligus, tapi tidak semua ke sana, teman kami banyak juga kan," katanya.

Sementara itu, SEVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Muhammad Fauzan mengatakan bahwa Hutama Karya juga siap mendukung pembangunan ibu kota negara.

Menurutnya, dengan total investasi sebesar Rp466 triliun, hal itu dapat menarik investor asing untuk ikut berpartisipasi, berinvestasi, dan bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal

“Mesti *nanya* anggotanya satu per satu karena ini *business to business discussions*.”

maupun BUMN.

Untuk itu, Hutama Karya juga berupaya optimal untuk melakukan utilisasi kapasitas dan kapabilitas perusahaan, mulai dari sektor infrastruktur, manufaktur, serta pembangkit energi di ibu kota negara.

"Yang pasti Hutama Karya selalu siap untuk menggarap dan mengembangkan proyek infrastruktur di IKN. Saat ini kami masih menunggu proses lelang dibuka sehingga kami bisa menyiapkan proyek infrastruktur mana yang bisa kami kembangkan," jelasnya kepada *Bisnis*.

DIBANGUN SENDIRI

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa untuk kebutuhan terkait dengan pemerintahan, pemerintah memang mendorong pengerjaannya oleh pihak Indonesia sendiri.

"Untuk gedung-gedung terutama seperti istana, kemudian kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat ketat, itu tentu diadakan sendiri oleh kita," ujar Suharso, Selasa (11/2).

Adapun, dalam mendorong kerja sama antara investor asing dan pihak perusahaan swasta serta BUMN, Suharso mengungkapkan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama.

"Skemanya macam-macam, ada skema kerja sama biasa, ada skema KPBU, *direct investment*, portofolio, skema menggunakan dana-dana *sovereign wealth fund*, tergantung dia punya *financial model* yang mereka mau pakai, kalau *business model* juga beragam bentuknya," jelasnya.

Suharso menambahkan bahwa hingga saat ini sudah banyak investor asing dari berbagai negara yang berminat untuk berpartisipasi pada proyek ibu kota negara. Namun, katanya, pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan skema kerja samanya.

Investor asing yang menunjukkan minat untuk berinvestasi tersebut di antaranya berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark, dan UEA.

"Banyak sekali, tapi kan kita harus lihat skema-skema yang mereka tawarkan, baik untuk kepentingan mereka sendiri dan juga untuk kepentingan kita. Jadi, jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang tidak *proper* buat mereka, nanti mereka kecewa, kita juga kecewa!" katanya.

Pada kesempatan terpisah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) terus melakukan upaya konsolidasi kepada pemerintah terkait dengan proyek ibu kota negara.

Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata mengatakan bahwa upaya ini juga bertujuan mendorong pemerintah agar mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Hal tersebut, katanya, sesuai dengan hasil Rapimnas Gapensi beberapa waktu lalu.

"Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk bersama-sama dengan Gapensi memaksimalkan peran anggota Gapensi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk ibu kota negara di Kalimantan Timur untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan arahan Presiden sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo," jelasnya kepada *Bisnis*, Rabu (12/2).

Lebih lanjut, katanya, Gapensi mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk secara bersama-sama mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pelaksanaan proyek. Termasuk di dalamnya, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja dan material konstruksi.

Sejauh ini, katanya, belum ada keterlibatan langsung Gapensi dalam proyek ibu kota baru. Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi terkait kebutuhan pemerintah dalam proyek infrastruktur di sana.

"Kami di asosiasi melakukan *match* antara *supply* dan *demand* untuk IKN. Ini yang mau kami konsolidasi. Jangan sampai ke-colongan, bahan material dan SDM dari luar, tetapi kalau ada dari investor asing sebagai bagian dari *demand*, harus didiskusikan, kami juga akan meng-*improve* kemampuan," jelasnya.

Errika menekankan bahwa proyek infrastruktur termasuk ibu kota negara, harus bisa berdampak pada industri konstruksi dalam negeri. Apalagi Gapensi memiliki sekitar 42.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. ■

SKEMA PEMBIAYAAN IBU KOTA NEGARA

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya besar. Pemerintah tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan dana pembangunan ibu kota baru. Oleh karena itu, peran swasta, BUMN/BUMD, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan. Bahkan, pemerintah mempersiapkan jika ada investor asing yang berminat berpartisipasi dalam membangun ibu kota baru.



Sumber: Bappenas.

Ilustrasi: Patricia Galpe Pratiwi/Nyuan Indonesia

Judul	Brantas Abipraya Minta Pembebasan Lahan Dituntaskan	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 21		
Resume	PT Brantas Abipraya memastikan pembangunan Bendungan Ciawi di Jabar berjalan sesuai dengan jadwal dan akan rampung pada tahun ini		

| BENDUNGAN CIAWI |

Brantas Abipraya Minta Pembebasan Lahan Dituntaskan

Bisnis, JAKARTA — PT Brantas Abipraya (Persero) memastikan pembangunan Bendungan Ciawi di Jawa Barat berjalan sesuai dengan jadwal dan akan rampung pada tahun ini.

Oleh karena itu, Brantas Abipraya berharap agar pemerintah segera membantu menyelesaikan pembebasan lahannya.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Miftakhul Anas mengatakan bahwa pembangunan bendungan akan terus dikawal ketat supaya berjalan sesuai dengan rencana karena menjadi bagian dari rencana induk pemerintah dalam pengendalian banjir di Jakarta.

“Sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Diharapkan bendungan ini bisa berfungsi pada tahun ini karena menjadi salah satu proyek strategis pengendali banjir Ibu Kota,”

ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (12/2).

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kendala umum yang dihadapi pembangunan bendungan senilai Rp798,70 miliar ini adalah pada proses pembebasan lahan.

Miftakhul pun berharap agar lahan yang belum dibebaskan segera diselesaikan pemerintah sehingga pekerjaan konstruksi terus berjalan sesuai rencana. “Masyarakat suka salah sasaran. Mereka demonya [pembebasan lahan] ke kami, padahal kan kami hanya kontraktor,” katanya.

Bisnis mencatat, pembebasan lahan Bendungan Ciawi sudah mencapai 92% yakni dengan lahan yang telah dibebaskan seluas 66,10 hektare atau 862 bidang.

Sementara itu, total kebutuhan lahan adalah 78,35 hektare atau 935 bidang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyebutkan bahwa kunci penanganan banjir di Jakarta adalah pengendalian air sebelum masuk ke Ibu Kota.

Anies berharap supaya dua bendungan yang merupakan proyek strategis Kementerian PUPR, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi bisa cepat rampung.

“Kalau dua bendungan itu selesai, volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, Insyaallah bisa dikendalikan, tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa karena makin banyak kawasan [di atas] yang digunakan untuk perumahan sehingga air pun mengalir ke sungai,” kata Anies, Rabu (1/1). (*Aprianus Doni T.*)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 21		
Resume	Kendaraan melintas proyek pembangunan Tol Cibitung-Cilingcing di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jabar, Rabu (12/2).		

■ PEMBANGUNAN TOL CIBITUNG-CILINGING



Anfara/Fakhri Hermansyah

Kendaraan melintas di sekitar proyek pembangunan jalan tol Cibitung-Cilingcing di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/2). Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, rencana uji

coba rekayasa lalu lintas di area gerbang tol Cibitung 1 yang rencananya dimulai pada Rabu (5/2) terpaksa ditunda karena pemasangan tiang penyangga utama yang belum rampung.

Judul	Sumatra Utara Menata Wajah Kota	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 16		
Resume	Provinsi Sumatra Utara mulai ancap-ancang menyiapkan infrastruktur penunjang kegiatan olahraga. Momentum tersebut juga akan dijadikan "senjata" bagi Sumut untuk menata wajah sejumlah kota di wilayahnya, termasuk guna memantik tingkat kunjungan pariwisata.		

| PROYEK STRATEGIS PENUNJANG WISATA |

SUMATRA UTARA MENATA WAJAH KOTA

Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2020 bakal digelar di Papua pada Oktober mendatang. Setelah Papua, pesta olahraga empat tahunan itu bakal berlangsung di dua provinsi, Aceh dan Sumatra Utara.

Adnan Nur Ari
adnan.nurari@bisnis.com

Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mulai ancap-ancang menyiapkan infrastruktur penunjang kegiatan olahraga. Momentum tersebut juga akan dijadikan "senjata" bagi Sumut untuk menata wajah sejumlah kota di wilayahnya, termasuk guna memantik tingkat kunjungan pariwisata.

Saat ini, sambutan pada kegiatan penyediaan sarana revitalisasi SMK kepada 21 sekolah pada Jumat (7/2), Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi memamerkan rencana pembangunan sport center yang digadang-gadang menjadi yang termegah di Indonesia.

Berada di atas lahan sekitar 300 hektare, pusat olahraga yang didesain dengan standar organisasi sepak bola dunia, FIFA, akan berlokasi di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dia menyebut akan ada stadion utama yang memiliki kapasitas 75.000 penonton. Adapun, kebutuhan investasinya diperkirakan sekitar Rp5,8 triliun.

Pekan lalu, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu telah menemui Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait dengan rencana pembangunan proyek tersebut di Sumut.

Sport center merupakan satu dari sejumlah proyek yang dituluskan pemerintah provinsi untuk masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2019–2024.

Atas gagasan itu, kata Eddy, pemerintah menyambut baik. Saat ini Pemprov Sumut tengah menyiapkan detail engineering design (DED) dan pengadaan lahan. Skema pembiayaan juga masih dibahas.

"Ada dua kegiatan yang begitu besar, di 2024 ada PON dan 2032 ada Olimpiade. Kalau tidak siap infrastrukturnya, alangkah malunya Sumatra Utara ini," katanya di Deli Serdang.

Fokus Pemprov selanjutnya yakni pembangunan jalan tol dalam kota Medan, light rail transit (LRT) dan bus rapid transit (BRT), Rumah Sakit Haji bertaraf internasional, dan pusat kegiatan untuk umat Islam atau Islamic center.

Terutama jalan tol dalam kota Medan, Eddy menyebut investasinya senilai Rp7 triliun dan akan groundbreaking pada Februari ini.

Sebagai informasi, jalan tol dalam kota Medan memiliki panjang 40,97 kilometer. Pembangunan tol itu direncanakan pada medio Maret 2020, dengan dilaksanakannya nota kesepakatan (MoU) antara Pemprov, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bersama dengan investor PT Citra Marga Nisapahala Persada Tbk dan PT Adhi Karya Tbk.

Adapun, pembiayaan dari studi kelayakan hingga konstruksi dilakukan oleh investor dan konsorsium.

"LRT dibangun tahun ini. Tol [dalam kota Medan] akan dilaksanakan groundbreaking Februari. Kita belajar harus selesai semua," katanya.

PEMBEBASAN LAHAN Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Yus Sukmono menjelaskan sebagian besar proyek pembangunan itu saat ini dalam tahap penyiapan dokumen, pengadaan lahan, dan mencari skema pembiayaan.

Ada dua proyek yang sudah masuk tahap pembebasan lahan, yakni sport center dan Islamic center.

Sport center bakal dibangun di atas lahan eks lahan gusa usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) II seluas 300 hektare. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada tahun ini. Jika berjalan sesuai rencana, konstruksi sport center bisa dimulai tahun depan.

Adapun, skema pembiayaannya masih dalam pembahasan, baik melalui APBD, APBN, maupun KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Dari lahan sport center seluas 300 hektare, sekitar 200 hektare bakal dibangun kawasan olahraga dan 100 hektare untuk area komersial.

"Area komersial itu yang akan dituluskan untuk kerja sama dengan swasta. Saat ini sudah banyak investor yang berminat baik dari investor asing dan BUMN," katanya pada Selasa (11/2).

Pemprov juga telah mengambil alih 50 hektare kepemilikan lahan eks HGU dari PTPN II untuk pembangunan Islamic Center. Dana sekitar Rp3,22 miliar disiapkan untuk ganti rugi lahan yang berlokasi di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu, beberapa proyek masih pada tahap penyusunan dokumen teknis berupa studi kelayakan dan DED.

Terutama proyek pembangunan LRT Medan—

Binjai—Deli Serdang—Karo atau disingkat Mebidango. Gubernur membebas kelompok kerja (Pokja) dengan Dinas Perhubungan sebagai pemimpin kelompok kerja.

Mereka bertugas mengidentifikasi irasé linasan LRT guna mengetahui kebutuhan pembebasan lahan. Identifikasi ditargetkan selesai pada tahun ini, sehingga pembebasan lahan dapat dimulai pada awal 2021. Selanjutnya, tahap konstruksi proyek LRT diharapkan dapat mulai tahun depan.

Pembangunan LRT Mebidango merupakan proyek strategis Sumut dan telah masuk dalam RPJMN 2019–2024. Moda transportasi ini nantinya juga akan terhubung dengan rencana proyek BRT Medan.

Proyek LRT dibangun sepanjang 41 km dan terdiri dari lima koridor. Pembangunan proyek itu memelan investasi sekitar Rp21 triliun. Pemprov menargetkan pembangunan Mebidango rampung pada 2023 dan dapat operasional saat penyelenggaraan PON mendatang.

"Kami [Pemprov Sumut] diminta komisionernya untuk pembebasan lahan [LRT] akan hal-hal yang silangnya realisasi. Adapun, pemerintah pusat masuk pada pembiayaan konstruksi," imbuhnya.

Baru-baru ini, Pemprov Sumut juga menargetkan fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp3,5 triliun.

Fasilitas itu akan digunakan untuk pembangunan RS Haji bertaraf internasional senilai Rp1,8 triliun dan pembangunan beberapa ruas jalan.

IMBAS SEKTOR WISATA

Eddy Rahmayadi menyatakan upaya memacu infrastruktur bakal berimbas besar ke sektor pariwisata Sumut. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diyakini bakal meningkat.

Dia menginginkan seluruh proyek itu rampung 2023, sebelum penyelenggaraan PON 2024. Jika sesuai rencana, kata dia, Deli Serdang bakal menjadi kota baru dengan kehadiran sport center dan Islamic center.

"Efek multiplier-nya sangat besar karena masuknya wisatawan dari mancanegara," imbuhnya.

Di sektor pariwisata, Sumut menargetkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman)

kan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Utara, wisman dari Malaysia masih menjadi kontributor utama jumlah kunjungan ke Sumut sepanjang 2019 yakni 46,75%, diikuti Singapura 6,24%, China 3,43%, Belanda 2,01%, dan Australia 1,95%. (Lihat ilustrasi)

Jumlah wisman dari 10 negara tersebut menyumbang 68,69% dari total kedatangan wisman di Sumut.

Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Muchlis menyampaikan berdasarkan rencana jangka menengah daerah (RPJMD) 2016–2023, target wisman yang datang ke Sumut mencapai 500.000 orang.

Pembangunan infrastruktur seperti tol dalam kota Medan diyakini akan memacu kunjungan ke Kawasan Danau Toba.

Selain mengandalkan Kawasan Danau Toba, Pemprov tengah mengembangkan tiga destinasi wisata lain. Ketiga destinasi tersebut yakni Tangkahan dan Bukit Lawang di Kabupaten Langkat, serta Berastagi di Kabupaten Karo.

Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Pariwisata mulai menyiapkan master plan untuk pengembangan wisata Taman Hutan Raya (Tahura). Dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp500 juta, master plan diharapkan dapat selesai sebelum semester 1/2020. ■

“Efek multiplier-nya sangat besar karena masuknya wisatawan dari mancanegara.”

mencapai 300.000 orang pada 2020. Target ini tumbuh 15% dari realisasi kunjungan 2019 sebanyak 260.311 orang. Target pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan tahun lalu sebesar 10,17%.

Berdasarkan

"Kalau tidak siap infrastrukturnya, alangkah malunya Sumatra Utara ini."



Eddy Rahmayadi
Gubernur Sumatra Utara

KUNJUNGAN KE SUMUT

Kawasan Danau Toba di Sumatra Utara menjadi satu destinasi pariwisata prioritas yang digarap oleh pemerintah. Mampukah penataan itu memberi stimulan terhadap peningkatan kunjungan wisata dari provinsi itu?



Kunjungan Wisman ke Sumut (orang)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DANAU TOBA

Negara	2018	2019
Malaysia	139.878	121.700
Singapura	18.620	16.242
China	8.654	8.916
Belanda	4.439	6.795
Australia	5.129	5.084
Jerman	5.852	5.087
India	4.401	3.924
Inggris	4.000	3.679
Amerika Serikat	4.150	3.984
Taiwan	3.233	3.408

Jumlah Kunjungan 10 Negara Utama ke Sumut (orang)



REDAKSI: JALAN DELO DI NANGGALAN, MEDAN

FAKSA: 061-4211111



Judul	Ruas Tol Paling Timur di Jawa Ditetapkan	Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Media	Kompas, Hal 16		
Resume	Tiga kabupaten di Jawa Timur dilintasi Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 kilometer. Lokasi ruas jalan di dua kabupaten sudah diputuskan yang akan diikuti proses pembebasan lahan.		

Ruas Tol Paling Timur di Jawa Ditetapkan

Tiga kabupaten di Jawa Timur dilintasi Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 kilometer. Lokasi ruas jalan di dua kabupaten sudah diputuskan, yang akan diikuti proses pembebasan lahan.

BANYUWANGI, KOMPAS— Ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 kilometer yang dirancang tahun 2007 ditargetkan bisa mulai dibangun tahun ini. PT Jasamarga dan Badan Pengelola Jalan Tol menargetkan konstruksi tol tersebut rampung pada 2025.

Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probawang) akan melintasi tiga kabupaten, yaitu Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi di Jawa Timur. Di Probolinggo dan Banyuwangi, jalan tol akan membentang masing-masing 30 kilometer (km), sedangkan di Situbondo 110 km.

"Saat ini, penlok (penetapan lokasi) ruas Probolinggo dan Situbondo sudah terbit. Penlok untuk Banyuwangi ditargetkan terbit akhir bulan sehingga Maret sudah proses pembebasan tanah," ujar Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Dominicus Hari Pratama, Rabu (12/2/2020), di Pendapa Saba Swagata Banyuwangi.

Saat ini, proses pembebasan lahan untuk wilayah Probolinggo sudah dimulai meski belum sampai pembayaran. Proses pembayaran diharapkan bisa segera sehingga lahan dapat diserahkan ke PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi untuk memulai proses konstruksi.

Proses konstruksi, menurut

Rencana Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi



Hari, akan dimulai di ruas Kraksaan, Probolinggo, tahun ini. Proses konstruksi tidak menunggu pembebasan tanah 100 persen. Apabila dirasa cukup memadai untuk konstruksi, proses dapat langsung dimulai.

"Sebulan hingga dua bulan setelah pembayaran pembebasan lahan di Probolinggo, proses pembebasan lahan untuk wilayah Situbondo akan dimulai. Namun, karena segmen ini paling panjang, maka pembayaran akan dilakukan secara bertahap per ruas," ucapnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap Jalan Tol Probawang segera terealisasi agar akses menuju Banyuwangi semakin beragam. Dengan demikian, pariwisata dan industri Banyuwangi dapat meningkat sehingga meningkatkan kesejahtera-

an masyarakat.

Hari mengungkapkan, dari 172 km total panjang Jalan Tol Probawang, 70 persennya lahan warga. Adapun 30 persennya milik Perhutani.

Lebar Jalan Tol Probawang direncanakan 60-70 meter dan memiliki dua lajur di setiap arah. Tol juga akan dilengkapi tujuh akses keluar-masuk. Akses itu ada di Kraksaan, Paiton, Besuki, Situbondo, Asem Bagus, Bajul Mati, dan Ketapang.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Abram Elsjaya Baru menuturkan, Jalan Tol Probawang direncanakan sejak 2007, setelah studi setahun sebelumnya. Namun, rencana itu baru dimatangkan 2018.

"Kami mempelajari *traffic* (arus lalu lintas) kendaraan yang akan lewat di Tol Probawang. Tahun 2018, BPJT merasa *traffic* kendaraan yang melintas cukup memadai untuk dibangun jalan tol. Setelah dirasa cukup, tender dimulai dan PT Jasamarga ditunjuk untuk membangun," ungkapnya.

Kajian tahun 2016, arus lalu lintas tol di Banyuwangi tergolong rendah, hanya 4.000 per hari. Jumlah itu kurang ideal untuk operasional jalan tol. Sebagai pembanding, tol Malang-Pandaan melayani minimal 10.000 kendaraan per hari.

Kendati Jalan Tol Probawang jadi ruas paling timur dari keseluruhan Jalan Tol Trans-Jawa, Abram optimistis arus lalu lintas dapat meningkat drastis. (GER)